

**STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
KEMENTERIAN DI MASA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON**

Achmad Saogi

Fungsional Perencana Muda, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran DIPA kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon di masa pandemi COVID19 ini melalui jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan *purposive sampling* sebanyak 20 orang dan menggunakan unsur strategi metode Richard P. Rumelt. Hasil penelitian dalam diagnosis ditemukan kendala dalam mempercepat penyerapan anggaran DIPA Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Masih terdapatnya kendala berupa belum updatenya fasilitas kerja berupa perangkat komputer, Sumber Daya Manusia yang lemah di bidang teknologi informasi, kebijakan mengirimkan dokumen online dan penutupan jamaah haji dari pemerintah Arab Saudi yang belum disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan dan masih adanya anggaran yang diblokir. Walaupun masih ada kendala tetap Kementerian Agama Kabupaten Cirebon harus mematuhi instruksi untuk mempercepat penyerapan anggarannya. Maka dari itu diperlukan strategi yaitu melakukan fleksibilitas kerja bagi pegawai yang berkaitan dengan proses pencairan anggaran, serta melakukan pencairan anggaran prioritas.

Kata kunci : strategi, pencairan anggaran, COVID 19

***STRATEGY FOR THE ACCELERATION OF BUDGET ABSORPTION IN
THE COVID-19 PANDEMIC: CASE STUDY OF THE MINISTRY OF
RELIGION IN CIREBON DISTRICT***

ABSTRACT

This study aims to find out how to accelerate the absorption of the DIPA budget of the Cirebon Ministry of Religion office during the COVID19 pandemic through qualitative research. The method used is observation, interview and documentation. Informants were selected by purposive sampling. The results showed that there were still obstacles in accelerating the absorption of the DIPA budget of the Ministry of Religion in Cirebon. There are still constraints in the form of work facilities that have not been updated in the form of computer equipment, weak Human Resources in the field of information technology, policies for sending documents online that have not been adjusted to the storage capacity and there is still a blocked budget. Although there are still obstacles the Cirebon Ministry of Religion must comply with instructions to accelerate the absorption of its budget. Therefore a strategy is needed which is to do work flexibility for employees related to the process of disbursing the budget, as well as making the disbursement of priority budgets.

Keywords: *efforts, budget disbursement, COVID 19*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID 19 ini membuat banyak negara mengalami kerepotan dalam perekonomiannya (Pardede Joshua; 2020) Negara Indonesia pun tidak luput dari penyebaran COVID 19 tersebut. Negara Indonesia bukan negara maju tetapi negara berkembang yang perekonomiannya masih berkembang. Pemerintah perlu melakukan langkah strategis guna menyelamatkan perekonomian nasional. Salah satu strateginya yaitu melakukan percepatan penyerapan anggaran pemerintah yang sudah dimasukkan dalam DIPA masing-masing kementerian. Strategi tersebut dianggap paling ampuh dalam memacu pergerakan ekonomi nasional (Batubara, P. Juliari ; 2020)

Sejauh ini sudah ada beberapa penelitian tentang percepatan penyerapan anggaran pemerintah yang dilakukan misalnya oleh Edward James Sinaga (2016), Ledi S. Gagola, Jullie J. Sondakh, Jessie DL Warongan (2015), Binti Zulaikhah, Dian Imanina Burhany (2019), R. Ruhmaini (2018).

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas belum ada yang membahas strategi percepatan penyerapan anggaran di masa pandemi COVID 19 yang melanda Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana

penyerapan anggaran yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah khususnya Kementerian Agama Kabupaten Cirebon sesuai instruksi Presiden. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi tambahan mengenai sejauh mana percepatan penyerapan anggaran kementerian lembaga yang telah dilakukan sesuai perintah Presiden.

LANDASAN TEORI

Strategi

Dalam kehidupan organisasi atau instansi pemerintah diperlukan sebuah strategi guna mencapai tujuan dari organisasi. Richard P. Rumelt (2012) mendefinisikan strategi yang baik mengandung 3 unsur inti yaitu : diagnosis, kebijakan penuntun dan tindakan koheren.

Diagnosis

Dalam tahap ini pimpinan harus bisa mencerna dan memahami situasi kondisi pada saat ini. Dia harus melihat dan mencermati setiap usaha yang dilakukan dengan melihat faktor-faktor penghambat dan faktor penunjangnya. Apabila melakukan tindakan tanpa menda-lami akar permasalahan maka akan terjadi bencana. Daignosis adalah "apa yang sesungguhnya terjadi". Dengan pertanyaan tersebut maka pimpinan segera menelaah

melalui informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang tersedia.

Dalam pandemi ini maka pimpinan mendiagnosa bahwa dunia sedang kacau dan ada masalah dalam hal penyerapan anggaran. Pimpinan harus bisa mencari hambatan-hambatan dalam penyerapan anggarannya.

Kebijakan penuntun

Kebijakan penuntun menguraikan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam sorotan diagnosis. Disebut penuntun karena hanya menunjukkan arah tanpa menyebutkan rinciannya. Setelah diagnosis dilakukan maka pimpinan membuat kebijakan penuntun guna mengatasi hambatan atau masalah yang ditemukan dalam diagnosis. Dalam hal ini pimpinan segera membuat langkah-langkah yang akan dilakukan guna mengatasi hambatan atau masalah yang ditemukan.

Tindakan Koheren

Inti dari tindakan koheren ialah tindakan atau aksi. Tindakan dalam strategi perlu mengkoordinasikan semua tindakan dan saling dukung memfokuskan energi. Pimpinan Kementerian atau lembaga dalam melakukan tindakan berkoordinasi dengan pimpinan teratas dan aturan-aturan yang telah diterapkan sehingga dapat terukur dan mencapai

Sasaran yang diinginkan. Dalam hal ini penyerapan anggaran dapat terlaksana sesuai keinginan dari Presiden Jokowi.

Penyerapan Anggaran

Anggaran merupakan penyertaan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo; 2009). Anggaran di Kementerian dalam bentuk DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. DIPA kementerian biasanya dibagikan dalam bulan-bulan akhir pada tahun sebelumnya. Anggaran DIPA berisi anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bansos.

Anggaran dibuat untuk operasional Kementerian atau Lembaga Negara. Anggaran kementerian merupakan anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik yaitu berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo ; 2009). DIPA Kementerian Agama Kabupaten Cirebon ada 4 yaitu : DIPA Setjen, DIPA Bimas Islam, DIPA Pendis dan DIPA PHU. Masing-masing DIPA mempunyai Pejabat yang bertanggungjawab dalam pengeloannya disebut Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan Pejabat yang bertanggung jawab secara keseluruhan

hanya 1 yaitu Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dan dalam pencairan ada Pejabat yang bertanggung jawab menandatangani dokumen berupa SPM dan hanya 1 yaitu Kepala Subbag Tata Usaha.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tipenya yaitu deskriptif yaitu melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Informan sebanyak 20 orang yang terlibat dalam proses pencairan anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adaptasi anggaran pemerintah dengan adanya serangan COVID 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. (Pardede J ; 2020). Hal ini jika tidak segera diatasi dan diantisipasi maka akan menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi Indonesia (Utomo Suryo ; 2020). Maka dari itu untuk memancing adanya pertumbuhan ekonomi maka Presiden Jokowi memerintahkan semua instansi pemerintah agar mempercepat penyerapan anggarannya (Jokowi ; 2020). Dengan adanya belanja barang, jasa dan konstruksi. Jika anggaran

pemerintah telah dibelanjakan maka pengusaha penyedia barang dan jasa serta konstruksi dapat beroperasi. Dengan beroperasinya perusahaan atau toko-toko tersebut menyelamatkan dari pemutusan pegawai. Dari penghasilan pegawai tersebut maka dapat menghidupkan perekonomian kecil (Marsono;2009).

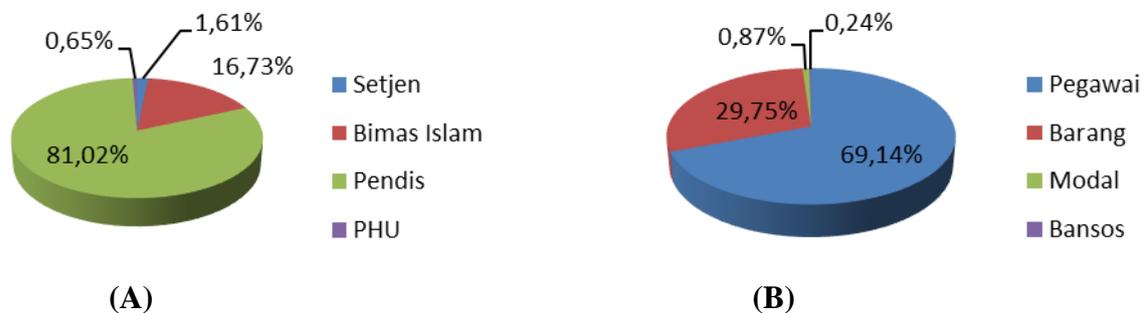
Dengan adanya instruksi dari Presiden maka para menteri segera membuat strategi dan aturan untuk mempercepat penyerapan anggarannya, termasuk Kementerian Agama. Menteri Agama Fakhru Rozi dalam rapat pimpinan memerintahkan jajarannya agar segera melaksanakan percepatan pencairan anggaran sesuai instruksi Presiden. (<https://sulbarkemenag.id/percepatan-pelaksanaan-program-dan-anggaran-tahun-2020>)

Kementerian Agama merupakan salah satu Kementerian yang mendapatkan anggaran terbesar yaitu sebesar Rp. 65,1 Triliun (Mulyani, Sri ; 2020). Kemudian anggaran tersebut dibagi ke dalam beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Agama Kabupaten Cirebon sendiri menerima anggaran sejumlah Rp.247.026.876.000, dengan rincian dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
[dalam Rupiah]

Satker	Pegawai	Barang	Modal	Bansos	Jumlah
Setjen	3.106.770.000	871.320.000	0	0	3.978.090.000
Bimas Islam	32.408.537.00	7.303.451.00	1.610.000.00	0	41.321.988.00
Pendis	134.396.093.00	64.760.123.00	381.089.000	595.450.000	200.132.755.00
PHU	884.284.000	547.805.000	161.954.000	0	1.594.043.000
Jumlah	170.795.684.00	73.482.699.00	2.153.043.00	595.450.000	247.026.876.00

(sumber : DIPA Kementerian Agama Kabupaten Cirebon)



Gambar 1. Prosentase Anggaran (A) DIPA Satker di Kantor Kemenag Kab. Cirebon (B) Porsi Belanja Anggaran

Tabel 2. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Perbulan
Satuan Kerja (Satker)

Bulan	Setjen [Rp]	Bimas Islam [Rp]	Pendis [Rp]	PHU [Rp]	Jumlah [Rp]
Januari	121.906.700	1.163.554.862	4.685.830.571	37.009.403	6.008.301.536
Februari	189.265.573	2.224.637.784	3.216.611.902	67.257.578	5.697.772.837
Maret	187.727.529	2.636.918.457	8.010.590.988	66.563.098	10.901.800.072
April	184.294.874	2.371.997.267	13.335.911.848	66.966.015	15.959.170.004
Mei	275.066.738	3.404.643.020	17.720.777.377	109.943.215	21.510.430.350
Juni	174.659.934	2.306.737.485	6.246.852.251	67.316.815	8.795.566.485
Juli	183.425.228	3.227.594.377	19.135.481.508	68.475.815	22.614.976.928
Total	1.316.346.576	17.336.083.252	72.352.056.445	483.531.939	91.488.018.212

(sumber OM SPAN Kemenkeu)

Tabel 3. Realisasi Anggaran Belanja Barang Perbulan

Bulan	Satuan Kerja (Satker)				
	Setjen [Rp]	Bimas Islam [Rp]	Pendis [Rp]	PHU [Rp]	Jumlah [Rp]
Januari	0	0	0	0	0
Februari	77.236.920	221.249.600	401.200.508	34.285.420	733.972.448
Maret	31.920.000	506.984.500	40.312.250.000	27.900.338	40.879.054.838
April	49.642.593	327.557.000	160.499.636	10.003.717	547.702.946
Mei	216.477.120	285.050.000	266.599.767	14.302.890	782.429.777
Juni	63.740.000	856.683.383	294.640.367	58.668.283	1.273.732.033
Juli	52.160.000	692.579.269	1.003.785.719	19.672.266	1.768.197.254
Total	491.176.633	2.890.103.752	42.438.975.997	164.832.914	45.985.089.296

(sumber OM SPAN Kemenkeu)

Tabel 4. Realisasi Anggaran Belanja Modal Perbulan

	Satuan Kerja (Satker)				
	Setjen [Rp]	Bimas Islam [Rp]	Pendis [Rp]	PHU [Rp]	Jumlah [Rp]
Januari	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	139.053.490	139.053.490
April	0	42.785.600	0	22.900.000	65.685.600
Mei	0	0	0	0	0
Juni	0	0	233.727.600	0	233.727.600
Juli	0	0	0	0	0
Total	0	42.785.600	233.727.600	161.953.490	91.488.018.212

(sumber OM SPAN Kemenkeu)

Dari data diatas anggaran terbesar yaitu anggaran belanja pegawai sebesar 69,14% dibandingkan belanja yang lainnya. Kantor Kementerian Agama melakukan strategi untuk mempercepat penyerapan anggarannya melalui unsur inti yang dikemukakan Richard P. Rumelt.

Diagnosis

Dari tabel-tabel dan diagram yang tersaji diatas serta kondisi pandemi yang melanda Indonesia maka dibuat diagnosis dan dianalisa kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam melaksanakan instruksi Presiden dan diteruskan oleh Menteri Agama dalam

membantu mempercepat penyerapan anggaran Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Dalam melakukan percepatan penyerapan anggaran DIPA Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tidak semudah yang dibayangkan, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Kendalanya yaitu:

SDM

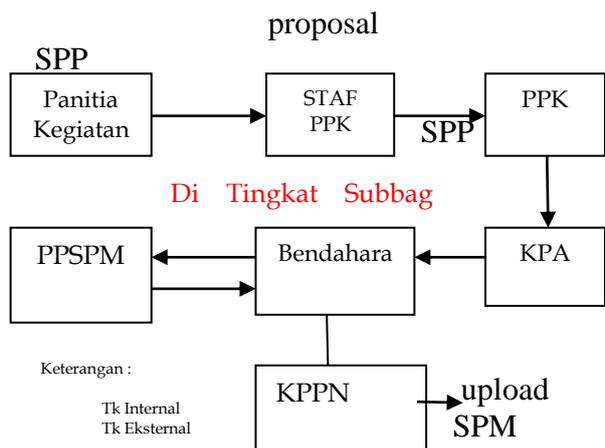
Sumber Daya Manusia sangat-sangat penting dan merupakan salah satu faktor utama di dalam suatu perusahaan dalam hal ini instansi pemerintah. Oleh karenanya, SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi perusahaan semakin meningkat (M.T.E Hariandja 2002:2). Tetapi kenyataannya PNS yang mumpuni dalam bidang IT sangat sedikit sehingga ketika ada kendala dalam perangkat komputer baik software atau hardwarenya harus memanggil pihak ke tiga untuk memperbaikinya. Terkadang ketika masalah tersebut hanya dikarenakan oleh serangan virus yang dapat diperbaiki dengan mengaktifkan anti virus dikarenakan SDM maka harus menunggu orang paham dan memakan

waktu sehingga menghambat. Operator yang mengupload dokumen yaitu bendaharadikarenakan terbatasnya SDM pegawai. Keempat bendahara bukan sarjana yang berhubungan dengan IT.

Sistem Kerja

Dalam rangka meminimalisir penyebaran virus COVID 19 maka diinstruksikan agar dilakukan shift kerja sebagian di rumah dan sebagian di kantor (Jokowi dalam konferensi pers 15/03/2020). Kementerian Agama pun menerapkan sistem kerja tersebut. Dalam proses pencairan anggaran diperlukan koordinasi antar pegawai yang terlibat dalam pencairan tersebut (Handoko ; 2003). Dapat dilihat dari diagram alur pencairan. Karena ketika mencairkan anggaran melibatkan beberapa bagian dalam prosesnya. Sedangkan dengan adanya pembagian kerja sehingga menyulitkan untuk koordinasinya. Selain shift juga pelaksanaan prosesnya semua melalui online. Dengan adanya online maka perangkat harus mumpuni. Sedangkan kalau online juga harus disukung oleh jaringan. Tetapi tidak semua daerah tempat tinggal pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cirebon jaringannya kuat.

Di Tingkat Seksi



Fasilitas Kerja

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Fasilitas kerja yang dibutuhkan dalam pandemi yang serba komputerisasi dan online ialah perangkat hardware berupa komputer atau laptop yang sudah update, tetapi perangkat komputer yang ada boleh dibilang sudah sangat ketinggalan zaman (Darajat ; 2014). Karena semenjak tahun 2018 ada moratorium untuk pengadaan perangkat IT untuk kantor. Karena perangkat yang sudah agak ketinggalan zaman maka mempengaruhi juga untuk kecepatan dalam pengerjaannya. Karena fasilitas IT sangat mempengaruhi untuk kelancaran

Kebijakan

Dalam masa pandemi ini banyak kebijakan-kebijakan dibuat untuk

mencegah penularan COVID 19 (Thomas R Dye dalam Islamy ; 2001). Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat kebijakan dengan menerbitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-267/PB/2020 perihal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Dalam Masa Keadaan Darurat COVID-19. Dalam Kebijakan dari Kementerian Keuangan dalam melayani satker untuk melakukan pencairan anggaran melalui online itu juga menjadi penghambat dikarenakan dalam 1 hari dibatasi sebanyak 100 SPM (Surat Perintah Membayar) dari satuan kerja se Kantor Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Cirebon. Kebijakan tersebut sebenarnya sudah melalui perhitungan tetapi karena ada instruksi Presiden maka semua instansi pemerintah mengikuti instruksi tersebut secara bersamaan sehingga mengakibatkan upload dokumen yang sejumlah 100 SPM sudah terpenuhi hanya dalam 1 menit. Bendahara Kementerian Agama Kabupaten Cirebon sangat kesulitan upload dokumen dikarenakan bergantung dari kecepatan bandwidth dari Internet. Dikarenakan semua pekerjaan serba online maka bandwidth tersebut terbagi-

bagi dengan pegawai yang lain sehingga tidak maksimal. Sedangkan untuk upload lagi harus menunggu esoknya lagi. Jelas kebijakan tersebut juga menyulitkan untuk mempercepat proses pencairan. Sebenarnya Kemenkeu melalui KPPN yang menangani pencairan anggaran satker sempat membuat kebijakan upload dokumen melalui email, dan kebijakan tersebut sangat tepat karena satker dapat mengupload dokumen dan KPPN dapat memeriksa dokumen yang diupload tanpa dibatasi dan mampu mempercepat proses penyerapan anggaran. Tetapi dikarenakan banyaknya uploadan satker maka email tersebut diblok oleh Gmail (Dirjen Perbendaharaan ; 2020) Dikarenakan masih menggunakan email gratis yang kapasitasnya terbatas. Maka aplikasi yang dipakai oleh Kemenkeu untuk upload SPM bisa diperbesar kapasitas penyimpanannya dan tanpa dibatasi dengan waktu sehingga satker dapat mengupload SPM tersebut dengan tenang. Tinggal pemeriksaan dokumen dari satker memakai sistem antrian. Yang upload duluan itu yang lebih dahulu diprioritaskan. Hal ini juga dapat terlihat dari jumlah realisasi yang terdapat dalam tabel. Dan pencairan anggaran dapat dipercepat pada bulan

Mei untuk setjen, bulan Juni untuk Bimas Islam dan PHU. Sedangkan pendis pada bulan maret ada lonjakan pencairan barang dikarenakan jadwal pencairan anggaran BOS madrasah per triwulan.

Jumlah satuan kerja (satker) di lingkungan KPPN Cirebon ada 144 satker. Kebanyakan satker mengupload lebih dari 1 SPM. Karena 1 SPM sama dengan 1 output kegiatan. Sedangkan dalam DIPA satker terdapat lebih dari 1 output kegiatan. Selain itu dalam pengajuan SPM yang menggunakan dokumen yang banyak seperti pengajuan Tunjangan Profesi Guru Non PNS yang berjumlah lebih dari 100 orang maka data pendukung yang ketika dibuat PDF jumlah Kilo bitenya besar tetapi utk upload Kilo bitenya dibatasi hanya 30 Kilo Bite. Ketika dikompres menjadi RAR pun masih besar itu juga menyulitkan bagi karyawan dikarenakan SDM untuk IT masih kurang. Untuk Kementerian Agama Kabupaten Cirebon sendiri terdapat 21 satker terdiri dari 4 satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, 12 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 5 Madrasah Aliyah Negeri.

Dengan adanya COVID 19 juga mengakibatkan pemerintah Arab Saudi

menutup jamaah haji yang datang dari luar negeri (Pemerintah Saudi Arabia ; 2020). Ini mengakibatkan imbas yang sangat besar dalam penyerpan anggaran Penyelenggara Haji dan Umroh. Anggaran terbesar dalam DIPA PHU Kementerian Agama Kabupaten Cirebon ialah anggaran pembiayaan operasional jamaah haji dari bimbingan manasik haji, konsumsi dan keperluan lain.

Anggaran Diblokir

Masih adanya anggaran di DIPA Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang masih diblokir. Hal tersebut dikarenakan waktu penyusunan anggaran dokumen yang diperlukan untuk melengkapi usulan tidak lengkap. Dokumen yang digunakan biasanya Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya yang dilampirkan tidak lengkap. Selain itu juga usulan anggaran yang diajukan tidak dirinci penggunaannya contohnya belanja ATK tidak dirinci penggunaannya untuk beli kertas, map, pensil dll. Di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon anggaran yang diblokir tersebut sudah diadakan perbaikan untuk mengajukan pembukaan blokir tetapi dikarenakan ada pandemi dan adanya kebijakan pembagian kerja antara Work From

Home dan Work From Office serta prioritas untuk penanganan pandemi maka ajuan pembukaan blokir anggaran tersebut juga ditunda dahulu.

Kebijakan Penuntun

Setelah diagnosis dilakukan maka disusunlah langkah-langkah yang mungkin dapat dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Langkah-langkah yang dilakukan tentu harus melihat aturan-aturan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Langkah-langkah yang dapat disusun dan diambil yaitu:

Evaluasi

Mengapa dilakukan evaluasi terlebih dahulu? Karena anggaran Kementerian Agama Kabupaten Cirebon sudah ada pada bulan Desember 2019 sedangkan pandemi COVID 19 mulai dari bulan Februari 2020 maka dari itu pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing DIPA segera melakukan evaluasi yaitu melakukan penilaian apakah DIPA tersebut dapat segera dicairkan sesuai dengan keadaan di waktu pandemi (Bryan and White ; 1987). Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon ada 4 DIPA yaitu Sekretariat

Jenderal (Setjen), Bimbingan Masyarakat Islam, Pendidikan Islam dan Pelayanan Haji dan Umroh disamping satker Madrasah Negeri yang berjumlah 17. Evaluasi yang dapat dilakukan masing-masing PPK yaitu menelaah perencanaan yang sudah dibuat dapat disesuaikan dengan kondisi pandemi, maka segera dilakukan pencairan dan jika belum sesuai maka segera dilakukan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. (Ernest R. Alexander dalam Aminudin : 2007)

Perencanaan Pelaksanaan Pencairan

Karena kebijakan Kemenkeu yang membatasi jumlah pencairan maka PPK harus bisa mengatur waktu dalam pencairan sehingga dapat melakukan upload dokumen. Karena ada waktu-waktu tertentu yang membuat upload dokumen menjadi rebutan. Hal ini biasanya pada awal bulan dan akhir bulan. Dan juga biasanya KPPN memberikan batas waktu pengajuan SPM pada tiap bulannya baik SPM gaji ataupun SPM kegiatan.

Maka PPK dan pegawai yang terlibat harus pandai dalam merencanakan pencairan. Menyiapkan strategi-strategi yang diperlukan sehingga upload dokumen dapat berhasil (Erly Suandi ; 2001). Salah

satunya yaitu para PPK memperhatikan batas waktu upload dokumen. Maka melakukan proses pelaksanaan administrasi pencairan sehingga menjadi SPM dilakukan jauh hari sehingga upload dokumen dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelum batas waktu yang ditentukan. Disini peran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon untuk mengkoordinasikan antar pegawai yang terlibat sehingga dapat memenuhi kuota SPM.

Revisi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon segera melakukan revisi DIPA disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam penyeimbangan keuangan negara dalam APBN imbas dari pandemi COVID 19 sehingga ada penghematan anggaran Kementerian Agama. Pemerintah juga melalui Kementerian Keuangan membuat aturan Tata Cara Revisi Anggaran pada tahun anggaran 2020 untuk memudahkan penggunaan anggaran yang karena kondisi tidak dapat digunakan. Selain itu segera berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat untuk proses pembukaan blokir DIPA.

Realokasi

Dalam masa pandemi anggaran yang bukan prioritas maka segera di realokasi untuk kebutuhan pencegahan penanggulangan COVID 19 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Seperti arahan Presiden Jokowi. Hal ini penting karena apabila ada pegawai yang tertular maka akan ditutup totalnya kantor dan pelayanan sehingga menghambat percepatan yang diinstruksikan Presiden. Anggaran yang dapat direalokasi yaitu anggaran sosialisasi yang melibatkan peserta yang banyak dan juga anggaran perjalanan dinas karena adanya pembatasan pergerakan manusia dalam mencegah meluasnya virus COVID 19. Hal ini sesuai dengan perpu no 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan dan di lanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan no 38/PMK.02/Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk penangan pandemi COVID 19 dan/atau

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan

Fleksibilitas Sistem Kerja

Dikarenakan dalam proses pencairan perlu adanya koordinasi antara pegawai yang terlibat dalam proses pencairan anggaran maka pimpinan membuat kebijakan pegawai tersebut dapat menukar shiftnya sehingga dapat memperlancar dalam proses penyerapannya. Koordinasi tersebut bersifat vertikal yaitu adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. (Hasibuan ; 2009). Maka dari itu peran Kepala Kantor sangat penting agar koordinasi dan komunikasi antar pegawai tidak terputus. Dalam proses pencairan tersebut bagian keuangan tidak bisa bekerja untuk mempercepat anggaran apabila dari seksi tidak mengajukan usulan pencairan anggaran (James D. Thompson dalam Handoko, 203:196). Dengan adanya pembagian shift maka koordinasi dan komunikasi melalui

sarana internet berupa WA atau telepon seluler.

Penyerapan Anggaran Prioritas

Pejabat segera memetakan anggaran prioritas dan anggaran rutin yang dapat dibelanjakan dalam periode tersebut contohnya anggaran ATK dapat dibelanjakan sekaligus dalam 1 tahun tetapi sebelumnya didata terlebih dahulu kebutuhannya selama satu tahun. Selain belanja ATK tersebut dilihat anggaran belanja pegawai yang bisa disegerakan pengeluarannya yaitu belanja tunjangan dan honor kegiatan. Menurut Mangkoesobroto (2006:116) pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Selain itu juga anggaran belanja modal yang tidak diblokir juga dapat disegerakan pencairannya. Strategi tersebut dilakukan dan menunjukkan hasil sehingga terdapat kenaikan penyerapan seperti terlihat dalam tabel.

Tindakan Koheren

Langkah-langkah yang telah disusun tersebut maka segera ditindaklanjuti dengan tindakan. Dan tindakan yang telah dilakukan yaitu

rapat dengar pendapat pimpinan dengan Fungsional Perencana. Setelah itu ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat antara staf PPK, PPK, Bendahara, Fungsional Perencana, Kepala Subbag Tata Usaha. Dalam rapat tersebut para PPK bersama Fungsional Perencana menelaah dan mengevaluasi anggarannya. dan membuat pemetaan anggaran yang dapat segera dicairkan dan mana anggaran yang perlu direvisi. Bagi anggaran yang masih diblokir segera koordinasi dengan Kantor Wilayah untuk proses pembukaannya. Dengan adanya aturan setiap kementerian untuk mengalokasikan anggarannya dalam penanggulangan COVID 19 maka dipilah anggaran yang akan direalokasi yaitu anggaran perjalanan dinas. Anggaran-anggaran tersebut direvisi oleh ke Kemenkeu melalui dirjen perbendaharaan propinsi. Selain itu ada anggaran yang direalokasi oleh Kementerian Agama RI dalam rangka membantu untuk mencegah dan menanggulangi dampak sosial oleh COVID 19. Anggaran yang diambil oleh Kementerian Agama RI direalokasi melalui Dirjen Anggaran Kemenkeu RI.

Pimpinan juga membuat aturan fleksibilitas hari dan jam kerja bagi para pegawai yang terlibat langsung dalam

proses pencairan anggaran selain itu juga membuat jadwal pencairannya sehingga dapat Para PPK segera mencairkan anggaran prioritas yang dapat segera dilakukan pencairan. Seperti anggaran ATK dan anggaran yang tidak terikat dengan waktu pencairan. Adapun kendala dari IT memaksimalkan fasilitas yang ada. Dan juga setiap bulan dilakukan rapat evaluasi guna melihat sejauh mana kemajuan proses penyerapannya. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan akhirnya mendapatkan hasil berupa meningkatnya penyerapan anggaran seperti terlihat di Tabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian 3 unsur inti strategi yang dilakukan yaitu diagnosis dan dalam diagnosis ditemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses percepatan penyerapan anggaran yaitu fasilitas kerja yang masih belum update, lemahnya Sumber Daya Manusia di bidang IT, kebijakan mengirimkan dokumen online yang belum disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan serta kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia meniadakan jamaah haji dari luar negaranya sehingga mengakibatkan anggaran PHU

Kementerian Agama Kabupaten Cirebon banyak tidak terserap dan masih adanya anggaran yang diblokir. Setelah dilakukan diagnosis maka disusun langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu evaluasi oleh PPK dibantu Fungsional Perencana mengenai mana anggaran yang dapat segera dicairkan dan mana anggaran yang harus direvisi, setelah itu segera melakukan revisi dan realokasi anggaran untuk kebutuhan pencegahan COVID 19 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon serta koordinasi dengan Kanwil Kemenag Propinsi Jawa Barat untuk membuka blokir anggaran. Pimpinan membuat aturan fleksibilitas kerja bagi pegawai yang berkaitan dengan proses pencairan anggaran, serta melakukan pencairan anggaran prioritas. Tindakan koherennya yaitu melakukan rapat tentang strategi yang dibuat kepada para pegawai yang terlibat dan juga melakukan evaluasi per bulannya selama pandemi ini.

Referensi

- Aminudin, Muhammad. 2007. *Evaluasi Rencana Lokasi Pemindahan Terminal Induk Km. 6 Banjarmasin*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.
- Bryant, C, White, G, L. 1987. *Managemen Pembangunan, untuk*

- Negara Berkembang*. Jakarta. LP3ES.
- Darajat, J. 2014. *Statistika dalam Penjas*. Bandung. FPOK UPI.
- Erly Suandi. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Handoko, T, Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BFE.
- Hariandja, Marihot, T, E. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu, S,P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Islamy, M, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta Edisi Sembilan. Bumi Aksara.
- Mangkoesebroto. (2006). *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta. Salemba Empat
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI.
- Marsono, M. (2009). *Konsep Anggaran Pemerintah*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Rumelt, Richard P. (2014). *Good Strategy/ Bad Strategy*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Internet
- Batubara, P, Juliari. 2020. *Percepatan Anggaran Diharapkan Menggerakkan Roda Ekonomi Masyarakat*
<https://halosemarang.id/juliari-percepatan-anggaran-diharapkan-menggerakkan-roda-ekonomi-masyarakat>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2020), *Pengajuan SPM ke KPPN Dalam Masa Darurat COVID-19*
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/3211-pengajuan-spm-ke-kppn-dalam-masa-darurat-covid-19.html>
- Jokowi (2020), *Realokasi Anggaran Atasi Covid-19, Pemerintah Hemat Rp190 Triliun*
<https://economy.okezone.com/read/2020/03/31/20/2192013/realokasi-anggaran-atasi-covid-19-pemerintah-hemat-rp190-triliun>
- Jokowi (2020), *Jokowi minta Kementerian Dengan Anggaran Gemuk Genjot Belanja*.
<https://bisnis.tempo.co/read/1363061/jokowi-minta-kementerian-dengan-anggaran-gemuk-genjot-belanja/full&view=ok>
- Kristalina Georgieva direktur pelaksana IMF (2020), *'luka ekonomi' karena krisis global akibat pandemi virus corona lebih buruk dari perkiraan*
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814>
- Mulyani, Sri. 2019. *10 Kementerian dengan Anggaran Terbesar di 2020*.
<https://finance.detik.com/infografis/d-4669631/10-kementerian-dengan-anggaran-terbesar-di-2020>
- Pardede Joshua. 2020. *COVID 19 Perlambat Pertumbuhan Ekonomi Global*
<https://money.kompas.com/read/2020/03/01/074000226/ekonomi--covid-19-perlambat-pertumbuhan-ekonomi-global>

Pemerintah Arab Saudi. 2020. *Corona Mewabah, Arab Saudi Tutup Pintu untuk Ibadah Haji 2020*
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200623/19/1256518/corona-mewabah-arab-saudi-tutup-pintu-untuk-ibadah-haji-2020>

Rozi, Fakhrrur. 2020. *Rapat Antar Pimpinan Tinggi*
<https://sulbarkemenag.id/percepatan-pelaksanaan-program-dan-anggaran-tahun-2020>

Utomo Suryo. 2020. Tiga Dampak Besar Pandemi COVID-19 Bagi Ekonomi RI
<https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>

Undang-undang dan Peraturan

Perpu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi COVID 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan no 38/PMK.02/Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penangan Pandemi COVID 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-267/PB/2020 perihal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Dalam Masa Keadaan Darurat COVID-19